

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

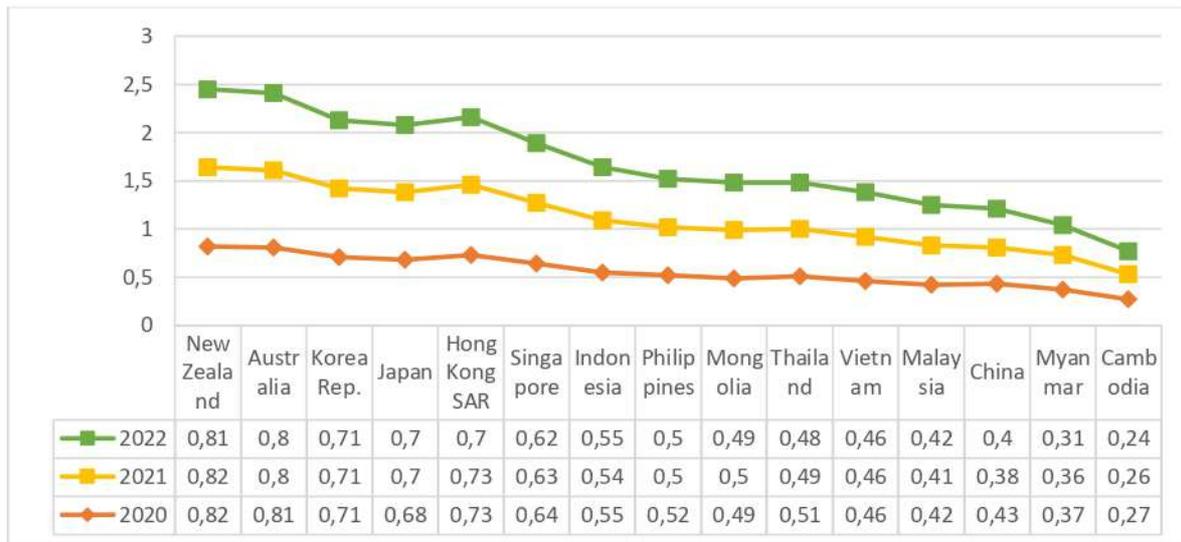
Kemajuan TIK mendorong perubahan tata kelola pemerintahan dan sektor publik, khususnya pemerintah, untuk berinovasi dengan menciptakan pelayanan yang transparan (Calista & Melitski, 2007) sehingga pemerintah menjadi terbuka dan inovatif (Li, 2021; Santa et al., 2019), kemajuan sebagai transformasi kecerdasan buatan dalam pemerintahan (Yigitcanlar et al., 2022). Open government adalah take line untuk menciptakan keterbukaan dan mewujudkan demokrasi (Coglianse, 2009); komunikasi informasi dan teknologi telah menjadi alat yang efektif dan efisien (Wirtz et al., 2018).

Konsep *open government data* mulai berkembang setelah Obama berjanji untuk menciptakan transparansi dan menghubungkan demokrasi (Ruijter et al., 2017); idenya adalah tugas Obama untuk membangun Amerika Serikat, terutama melalui lembaga pemerintah (Ruvalcaba-Gomez et al., 2018). Obama kemudian menjanjikan *open government* yang belum pernah ada sebelumnya (White House, 2015). Setelah gagasan *open government* diprakarsai oleh beberapa negara, mereka mulai mengembangkan fungsi administrasi yang transparan. Menurut Gascó-Hernández *et al.* (2018), *open government* mendorong transparansi pemerintah dan memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, beberapa alasan utama perlunya transparansi adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sejak Obama mendemonstrasikan konsep *open government* dalam dua dekade terakhir, banyak implementasi sistem pemerintahan terbuka telah diterapkan (Wirtz & Birkmeyer, 2015).

Implementasi *open government* diberbagai negara mendorong transformasi informasi dan data berkualitas yang dibangun secara kolektif (Conradie & Choenni, 2019; Zhao & Fan, 2018), akuntabilitas dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja sektor publik.

Menurut survei yang dilakukan oleh World Justice Project (gambar 1), dalam kurun waktu 2020-2021 New Zeland menjadi negara dengan tingkat keterbukaan tertinggi didunia, diikuti oleh Australia, Korea, dan Jepang. Dalam kawasan Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat kedua setelah Singapore dengan index keterbukaan tertinggi.

Gambar 1. 1 Open Government Index In East Asia And Pasific



Sumber. (World Justice Project, 2022)

Di Indonesia gerakan open government ini telah direspon oleh pemerintah Indonesia melalui Open Government Indonesia (OGI) sejak tahun 2011 baik di pemerintahan pusat maupun daerah (Fernandes & Fresly, 2017). Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan. OGI memungkinkan adanya saluran komunikasi yang bersifat interaktif bahkan real-time (komputasi waktu nyata, langsung dapat diamati dan direspon). Berbagai jalur komunikasi sebagai wujud semakin terbukanya pemerintah dapat diamati di jejaring sosial maupun portal layanan publik bagi masyarakat yang terintegrasi walaupun belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia (Zulfikar, 2018). Hadirnya OGI sebagai upaya untuk melihat dampak atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Kebijakan ini dibuat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik (Soegiono, 2017).

Pada satu decade terakhir open government di Indonesia sudah berkembang akan tetapi masih pasif (Andhika, 2017). Dalam beberapa tahun, implementasi *open government* masih parsial, tidak komprehensif untuk pemerintahan integratif (Indonesian Corruption Watch, 2015; Soegiono, 2017). Laporan OGI mencatat bahwa pada tahun 2014 capaian Renaksi (Rencana Aksi) sebesar 55%, 26% on progres, dan 19% tidak tercapai (Open Government Indonesia, 2015). Disisi lain pelaksanaan Open Government di topang oleh penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, atau e-government. Pada pelaksanaan open government dan e-government ini berjalan lambat/ tidak merata diseluruh daerah (gambar 1.2).

Gambar 1. 2 Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah di Indonesia



Sumber. (Rozikin et al., 2020)

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa pelaksanaan e-government pada sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia baru sampai pada tahap pematangan (Rozikin et al., 2020). Menurut laporan UN E-Government mulai 2003-2018 faktor utama yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan e-government di Indonesia ialah keterbatasan infrastruktur yang ada (Samuel, 2021). Sejalan dengan itu, pada tahun 2022, 14,3% infrastruktur menjadi tantangan besar bagi pelayanan berbasis digital di indonesia, diikuti dengan keamanan data (14%),

kemampuan SDM pemerintah (11%), budaya konvensional yang kuat (4,9%) dan lainnya (Marsyukrilla, 2022). Permasalahan infrastruktur yang terjadi disebabkan oleh kesenjangan pembangunan fasilitas informasi dan komunikasi yang ada di daerah (Yusuf, 2019). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, secara umum ditahun 2019-2020 indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) mengalami peningkatan, Provinsi dengan IP-TIK tertinggi pada 2020 adalah DKI Jakarta, yaitu 7,46 sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Papua, yaitu 3,35 (Untari et al., 2021). Laporan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan infrastruktur teknologi masih sangat terpusat di kota-kota besar, dan belum maksimal di daerah kecil.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan open government menggunakan aspek-aspek yang mempengaruhi pemerintahan terbuka di 34 Pemerintah Provinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat penggunaan dan penerimaan di Indonesia dalam pelaksanaan open government di Indonesia. Penelitian ini mengadaptasi determinan kinerja pemerintah, e-government, demokrasi, pembangunan manusia, dan TIK dalam mempengaruhi open government sebagai indikatornya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat demokrasi, pembangunan manusia, dan infrastruktur teknologi terhadap e-government dan performa pemerintah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat performa pemerintah dan e-government terhadap open government di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Thesis ini disusun untuk menggabarkan konsep open government yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka

penelitian ini menguji aspek-aspek yang mempengaruhi pemerintahan terbuka di Indonesia; penulis berasumsi bahwa negara-negara dengan demokrasi yang baik, perkembangan manusia, dan perkembangan teknologi adalah faktor pendorong untuk pemerintahan terbuka. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah **Menguji penerapan open government menggunakan aspek-aspek yang mempengaruhi pemerintahan terbuka di 34 Pemerintah Provinsi.**

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaan terletak pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu penelitian dengan lokus *open government* belum banyak diminati. Penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan konsep dan kajian open government, selain itu memberikan perspektif baru dari beberapa aspek dalam penerapan open government. Adapun manfaat lainnya yaitu menjadi bahan referensi dan penelitian selanjutnya yang tentunya konteks yang sama dan pada studi case yang berbeda.

b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan, pertimbangan, dan masukan untuk para instansi pemerintah atau lembaga yang bersangkutan untuk terus meningkatkan kualitas informasi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam upaya penerapan open government. Selain itu dan memperhatikan hal-hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan open government di Indonesia.